

**PENGARUH PENDAPATAN TKI TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Tenaga Kerja Indonesia di  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**ACHMAD AZIZ RISQULLOH  
NPM: 1851010454**



**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PENGARUH PENDAPATAN TKI TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Tenaga Kerja Indonesia di  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Achmad Aziz Risqulloh  
NPM: 1851010454**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing 1 : Dr. Rubhan Maskyur M.Pd  
Pembimbing II : Zulaikah M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri memicu tenaga kerja untuk melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan pendapatan yang didapatkan secara tidak langsung terjadi peningkatan kesejahteraan di suatu daerah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh TKI di Kabupaten Lampung utara pada tahun 2019 yang berjumlah 113 responden. Peneliti menetapkan jumlah sampelnya sebanyak 53 responden keluarga TKI di Lampung Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dengan kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan TKI (X) sebesar 0,495 artinya jika variabel pendapatan TKI (X) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kesejahteraan keluarga (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,495%. Terdapat pengaruh pendapatan TKI kesejahteraan keluarga dalam perspektif ekonomi islam. Masyarakat kabupaten Lampung Utara sudah menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan ekonomi dilihat dari TKI bekerja dalam sektor yang halal dan memperoleh penghasilan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Masyarakat mengalokasikan uang untuk menunaikan zakat dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, pendidikan, renovasi rumah, membuka usaha, investasi, membeli barang-barang yang halal dan membeli apa yang dibutuhkan bukan untuk berperilaku konsumtif atau untuk berfoya-foya. hal ini tentunya merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam.

**Kata kunci : Pendapatan TKI, Kesejahteraan Keluarga**

## **ABSTRACT**

*The background of this research is the lack of employment opportunities in the country which triggers the workforce to migrate abroad by becoming Indonesian Migrant Workers Abroad (TKI). With the income obtained indirectly there is an increase in welfare in an area. The purpose of this study was to find out how the influence of TKI income on the level of family welfare in North Lampung district.*

*The research method used in this study is a quantitative approach. The type of research used in this research is correlational research. The population in this study were all TKI in North Lampung Regency in 2019 totaling 113 respondents. The researcher determined that the sample size was 53 respondents from TKI families in North Lampung. Data collection techniques used in this study were questionnaires and documentation.*

*The results of this study From the results of the study there is an influence of TKI on the level of family welfare with the conclusion that H1 is accepted. The regression coefficient value of the TKI income variable (X) is 0.495, meaning that if the TKI income variable (X) increases by 1%, the family welfare variable (Y) will increase by 0.495%. There is an influence on the welfare income of TKI families in an Islamic economic perspective. The people of North Lampung district have implemented Islamic principles in economic activities. It can be seen from the TKI working in the halal sector and earning income in an honest way and not harming others. The community allocates money to pay zakat and give alms to people in need. Income that is used to buy halal goods and buy what is needed is not to behave consumptively or to splurge. The people of North Lampung also use remittances for long-term needs and for the educational needs of families in their hometown, this is of course an economic activity that is permissible in Islam.*

**Keywords: TKI Income, Family Welfare**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Aziz Risqulloh

NPM : 1851010454

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis



Achmad Aziz Risqulloh



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

## PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi TKI di Kabupaten Lampung Utara)

**Nama** : Achmad Aziz Risqulloh

**NPM** : 1851010454

**Program Studi** : Ekonomi Syari'ah

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Rubhan Masykur, M.Pd**  
NIP.1966040221996031001

**Pembimbing II**

**Zulaikah, M.E**  
NIP.199104192019032014

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi TKI di Kabupaten Lampung Utara)” Disusun oleh, Achmad Aziz Risqulloh, NPM. 1851010454, Program Studi Ekonomi Syari’ah, Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Selasa, 15 November 2022.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang : Dr. Asriani, S.H.,M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M.**

(.....)

**Penguji I : Dimas Pratomo, M.E.**

(.....)

**Penguji II : Zulaikah, M.E.**

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A**  
**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

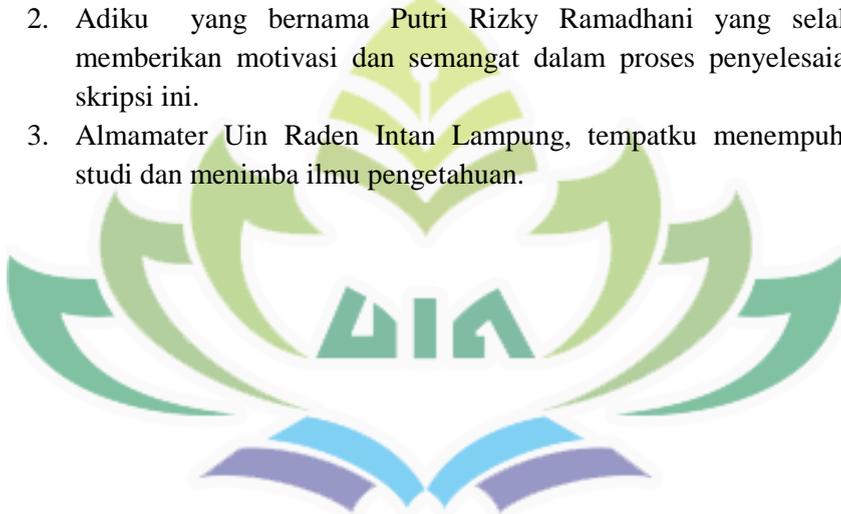
*“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib/keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasib/keadaan mereka sendiri...”  
(Q.S. Ar-Ra'ad :11)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang paling dalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Supriyadi dan Ibundaku tercinta Sunarti, yang telah mendidik, mengarahkan, serta selalu memberi dukungan, motivasi dan memberikan kasih sayang serta do'a restunya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang lebih dari dunia dan akhirat.
2. Adiku yang bernama Putri Rizky Ramadhani yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Uin Raden Intan Lampung, tempatku menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugrahi nama Achmad Aziz Risqulloh oleh kedua orang tua tercinta. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan pada 16 september 2000 di Humas Jaya kabupaten Lampung Tengah

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Bumiraharja Lampung Utara selesai pada tahun 2012
2. SMP Al-Amin Sukoharjo Lampung Utara selesai pada tahun 2015
3. MA Plus Al-Amin Sukoharjo Lampung Utara selesai pada tahun 2018
4. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan ilmuNya kepada semua makhluk. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini mengenai Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lampung Utara).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk hal itu maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

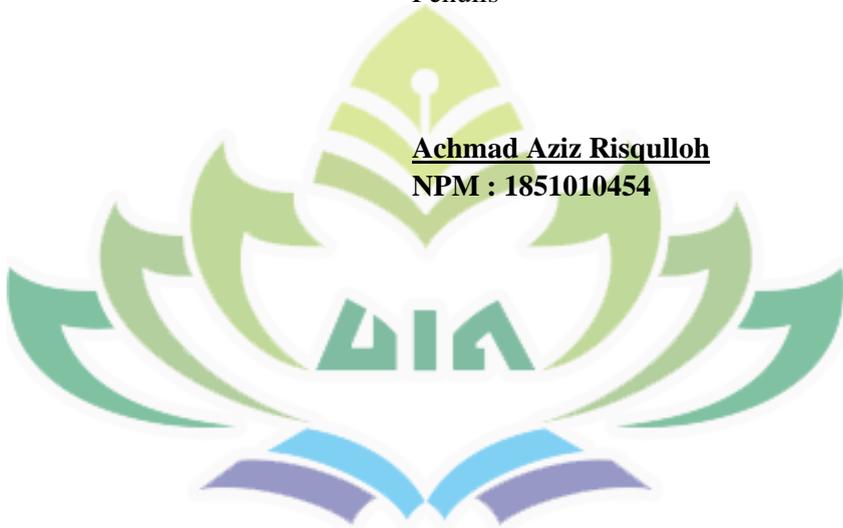
1. Prof. Tulus Suryanto, SE., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Dr. Rubhan Maskyur M.Pd dan Zulaikah M.E selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat terselsaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh masyarakat yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berarti.
6. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
7. Orang tuaku, kakakku, saudara kembarku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan 2018

9. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akhir kata penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat berguna untuk kita semua.

Bandar Lampung,        Juli 2022  
Penulis

**Achmad Aziz Risqulloh**  
**NPM : 1851010454**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Relevan .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Teori Kesejahteraan .....	17
B. Pendapatan.....	18
1. Pengertian Pendapatan .....	18
2. Jenis-jenis Pendapatan .....	19
3. Sumber Pendapatan .....	20
4. Indikator Pendapatan .....	21
C. Kesejahteraan Keluarga .....	22
1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga.....	22
2. Karakteristik Kesejahteraan Keluarga .....	23
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan	

Keluarga .....	25
4. Indikator Kesejahteraan Keluarga .....	26
D. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .....	28
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .....	28
2. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .....	29
3. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ..	32
4. Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .....	36
E. Perspektif Ekonomi Islam .....	37
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	37
2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam .....	38
3. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	44
4. Ruang Lingkup Ekonomi Islam .....	46
5. Indikator dalam Ekonomi Islam .....	47
F. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	50
G. Pengajuan Hipotesis .....	52

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	53
C. Populasi, Sampel dan Teknik .....	54
D. Definisi Operasional Variabel .....	57
E. Instrumen Penelitian .....	60
F. Uji Validitas dan Reabilitas Data .....	61
G. Uji Prasyarat Analisis .....	63
H. Uji Hipotesis .....	64

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	67
B. Uji Validitas dan Data .....	70
C. Pembahasan .....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kerja Indoensia (TKI) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2019 .....	6
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel .....	56
Tabel 3.2	Kriteria Penskoran Jawaban.....	57
Tabel 4.1	Negara Tujuan TKI di Kabupaten Lampung Utara .....	65
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan TKI (X) .....	66
Tabel 4.3	Hasil Uji Valliditas Variabel Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Y) .....	66
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan TKI (X) ....	67
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Keluarga (Y) .....	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas .....	68
Tabel 4.7	Hasil Regresi Linear Sederhana.....	70
Tabel 4.8	Hasil Uji T .....	71
Tabel 4.9	Hasil Uji R <sup>2</sup> .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap judul seperlunya. Adapun penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lampung Utara.

Maka dari itu peneliti akan menguraikan istilah – istilah yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup> Istilah pengaruh disebut juga dengan akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara suatu variable dengan variable lainnya. Adapun variable yang saling mempengaruhi dalam penelitian ini adalah TKI dan remitansi merupakan variable independent. Sedangkan perekonomian merupakan variable dependent.
- b. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>2</sup>
- c. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>3</sup>

- d. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>4</sup> Keluarga sejahtera dalam penelitian ini yaitu keluarga yang memiliki anak dua atau lebih, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, tidak memiliki masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.
- e. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.<sup>5</sup> Konsep perspektif dalam penelitian ini adalah melihat pandangan teori Islam mengenai TKI, Remitansi dan pertumbuhan ekonomi yang baik dan benar serta seharusnya sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam.
- f. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>6</sup> Ajaran ekonomi Islam mengharapkan seluruh masyarakat dapat mencapai

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia N0.13 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup> Gunawan, suodiningrat. *Membangun perekonomian rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, (Jakarta:Gramedia. 2011)

<sup>6</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

kemaslahatan (*falah*) dalam kehidupannya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam yang berlandaskan pada unsur Ketuhanan, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini Adalah Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lampung Utara) adalah menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan TKI terhadap kesejahteraan keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan melakukan penelitian pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan peradaban manusia di era globalisasi telah mendorong adanya usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, permasalahan kesejahteraan identik dengan permasalahan kesenjangan sosial, pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, dan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui kebijakan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek. Dalam hal ini, peran penting yang mempelopori dalam proses tersebut adalah institusi Negara. Hal itu ditandai dengan tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang undang dasar 1945 yang berkaitan dengan kesejahteraan terdapat dua point, yaitu pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan kewajiban pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.<sup>7</sup>

Kesejahteraan ekonomi dapat diukur berdasarkan angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan sehat",

---

<sup>7</sup> Femy M. G. Tulusan dan Very Y. Londa, *Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan*, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, dalam [www.jurnalpendapatan.com](http://www.jurnalpendapatan.com), diakses (diakses pada tanggal 17 maret 2016)

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan dan keterampilan", dan *purchasing power parity* mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (*Human Development Index*) yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini terlihat dari masih adanya perlakuan yang diskriminatif bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, baik dalam pemberian akses pendidikan, akses ekonomi, dan akses di bidang politik. Posisi ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat kalangan menengah kebawah dalam posisi yang tidak berdaya.<sup>8</sup>

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, TKI sering sekali dikonotasikan dengan tenaga kerja yang tidak memiliki skill keahlian dalam bidang akademik dan lainnya. Adapun upaya pemerintah mengadakan beberapa program yang bertujuan untuk menanggulangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan pengendalian lapangan kerja, pengadaan pelatihan, dan ketenaga kerjaan.

Kondisi kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri memicu tenaga kerja untuk melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Di sisi lain, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran adalah dengan memfasilitasi permintaan tenaga kerja ke luar negeri. Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang isinya bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan

---

<sup>8</sup> Junaidin, H. Zulkarenaen Musa, & Suharyani, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha", eJournal Administrasi Negara, vol. 4 (2), 2014 : 1300-1313

perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberikan dampak positif antara lain menambah devisa negara terutama daerah asal TKI dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI (2021), pemasukan devisa dari TKI (remitansi) pada tahun 2018 naik sebesar 37,3 persen bila dibanding Tahun 2017 yaitu mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp 80,24 trilyun). Devisa dari TKI ini merupakan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Lampung Utara sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung termasuk daerah dengan jumlah TKI Negeri. Rincian negara tujuan TKI asal Lampung utara yakni Malaysia, Singapura, Hongkong, Saudi Arabia, Taiwan. Jumlah TKI asal Lampung Utara 113, Salah satu bukti adalah semakin banyaknya usaha penyedia jasa penyalur tenaga kerja yang siap membantu masyarakat yang berminat untuk pergi bekerja di luar negeri.<sup>9</sup>

Jumlah penduduk di daerah Lampung utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, penduduk kota Lampung utara masih banyak membutuhkan lapangan pekerjaan yang siap untuk melakukan pekerjaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dikarenakan sumber daya manusia. Semakin padatnya penduduk disuatu wilayah yang menyebabkan terjadinya masyarakat lampung utara melakukan pekerjaan diluar negeri dengan skill yang terbatas.

---

<sup>9</sup><https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/06/25/lnbxsh-ke-taiwan-tki-asal-lampung-menuju>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2021

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tenaga Kerja Indoensia (TKI) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah TKI</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi Lampung utara</b>
2016	98	5,01%
2017	112	5,10%
2018	110	5,12%
2019	113	5,19%
2020-2022	-	

Sumber; Badan Nasional Penempatan TKI Lampung Utara, Badan Pusat Statistika Lampung Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah TKI di tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan. Ditahun 2016-2017 mengalami peningkatan mencapai 112 orang, menurut analisis kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi dengan di tandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membuat masyarakat haru melakukan pekerjaan diluar negeri. Tahun 2017-2018 jumlah TKI yang berangkat asal Lampung Utara mengalami peningkatan hingga 110 orang. Tahun 2018-2019 jumlah TKI yang berangkat asal Lampung Utara mengalami peningkatan hingga 113 orang, maka semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadikan faktor utamanya kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Pada fase ini dilihat dari remitansi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana jumlah TKI meningkat, remitansi TKI meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Faktor yang utama adalah besarnya tawaran upah yang diberikan serta kebutuhan hidup yang menajadi pendorong untuk melakukan pekerjaan di luar negeri.

Menurut Loen seseorang memutuskan untuk menjadi TKI ini juga diakibatkan karena tidak stabilnya perekonomian di Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi TKI

karena mereka berfikir dengan mereka menjadi TKI itu dapat memperbaiki perekonomian. Selain itu TKI yang bekerja di luar negeri rata-rata memperoleh pendapatan empat hingga enam kali lebih tinggi daripada saat mereka bekerja di Indonesia. Remitansi yang dikirim ke kampung halaman mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sementara keterampilan baru yang diperoleh membantu mereka menemukan pekerjaan yang lebih baik ketika kembali ke tanah air.<sup>10</sup> Berbeda dengan pendapat tersebut, hasil observasi peneliti ditemukan bahwa beberapa keluarga TKI yang ditinggalkan di salah satu desa di Lampung Utara jauh dari kata sejahtera seperti yang terlihat keluarga yang ditinggalkan belum punya tempat tinggal atau mengontrak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mencari pekerjaan lain. Selain itu Penggunaan uang remitansi atau pengiriman uang melalui perbankan oleh TKI masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peningkatan jumlah TKI disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan hidup serta masih sulitnya mencari pekerjaan yang ada di Lampung Utara, maka menjadi TKI adalah salah satu cara yang dapat di tempuh masyarakat guna untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini di duga ada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk bekerja keluar negeri yaitu jumlah pendapatan di daerah asal dan tingkat pendidikan terakhir.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga erat kaitannya dengan besaran pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan dan dikeluarkan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana penelitian oleh Wagle menyatakan : *“Income and consumption are straightforward and extremely useful measures of economic welfare, as they capture the means by which individuals and households can achieve human well-being. Income and onsumption tend to highly correlate with each*

---

<sup>10</sup> Loen, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: grsindo, 2008)

*other because consumption derives from income and income is essential for consumption.*"<sup>11</sup>

Dapat diartikan bahwa pendapatan merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, karena baik secara individu maupun rumah tangga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Pendapatan memiliki kaitan dan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hendrik bahwa pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, tetapi dipandang dari segi makro ekonomi yang menggunkan ukuran tingkat kesejahteraan menurut BPS (Badan Pusat Statistik). Sehingga intervensi dalam petani penggarap kopi bahwa pendapatan dan konsumsi rumah tangga akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan pada hakikatnya terpenuhinya segala kebutuhan sehingga dapat hidup wajar dan sesuai dengan lingkungannya. Kesejahteraan menggambarkan kepuasan seseorang karena mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan yang bersifat kebendaan lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan survey awal, pada keluarga TKI di Lampung Utara mengenai alasan memilih bekerja diluar negeri yaitu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menjadi TKI adalah masalah ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja. Faktor lainnya yakni masyarakat tergiur akan iming-iming untuk mendapat uang dalam jumlah banyak setiap bulan, dan gaji mereka akan dibayar dengan menggunakan mata uang dolar.

Pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri,

---

<sup>11</sup> Hanifah Amanaturrohim, dan Joko Widodo.. *Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi. Di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Economic Education Analysis Journal*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2016, Issn 2252-6544. Hlm. 469.

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 471

yakni dengan “bekerja”. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya.<sup>13</sup>

Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah Ayat 105 :

وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٦

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At Taubah Ayat:105).*<sup>14</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam Islam sangat menganjurkan bagi setiap individu untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal dan pekerjaannya. Diantara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab, hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Bagi masyarakat bekerja apa saja tidak menjadi masalah selama dalam bekerja memperhatikan syariat yang di halalkan oleh agama, baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika pekerjaan itu baik dan tidak menjurus kehal hal yang menimbulkan maksiat maka itu dibolehkan. Islam mengharamkan

<sup>13</sup> Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*(Jakarta: Salemba Empat, 2015)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv Pustaka Harapan, 2006 )

bagi wanita yang bekerja ke luar negeri atau menjadi TKW ketika mereka bekerja tanpa di dampingi seorang mahramnya. Namun apabila wanita bekerja bagi yang sudah bersuami dan mendapatkan izin dari suami untuk bekerja ke luar negeri, maka Islam membolehkan selama wanita dalam bekerja sesuai ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri pengiriman TKI membawa dampak yang positif dilihat dari perspektif pembangunan nasional antara lain: 1) peningkatan pendapatan keluarga, 2) peningkatan devisa negara, 3) peningkatan ketrampilan kerja, 4) pengurangan masalah pengangguran.

Sejauh ini, pengaruh remitansi terhadap pertumbuhan ekonom masih menjadi perdebatan. Disatu sisi remitansi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi. Remitansi merupakan komponen dari tabungan asing dan pelengkap tabungan nasional, sehingga peningkatan remitansi akan menambah sumber dana yang dapat digunakan untuk berinvestasi.<sup>15</sup>

Dengan jumlah TKI yang tinggi yang melakukan pekerjaan diluar negeri akan menghasilkan remitansi yang tinggi serta secara tidak langsung terjadi peningkatan kesejahteraan di suatu daerah. TKI yang memiliki keahlian yang secara khusus akan menepatkan kerja yang layak di negara tersebut. TKI berupaya agar remitansi yang diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan status sosial keluarga TKI melainkan juga meningkatkan investasi daerah asal serta menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat menyerap pengangguran yang ada di daerah asalnya.

Latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh TKI dan Remitansi Terhadap Kesejahteraan keluarga TKI Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Lampung Utara)”.

---

<sup>15</sup> Solimano, A. *Remittances by Emigrants*. 2003

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memfokuskan masalah ini hanya membahas yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dengan meneliti keluarga TKI yang berada di Lampung Utara yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Abung Surakarta, Abung Timur, Abung Semuli dan Abung Barat. Dengan meneliti keluarga TKI yang lebih dari 1 tahun menjadi pekerja migran Indonesia .

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan TKI terhadap kesejahteraan keluarga di Lampung Utara?
2. Bagaimana pendapatan TKI terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Lampung Utara dalam perspektif islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan TKI terhadap kesejahteraan keluarga di Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan TKI terhadap kesejahteraan keluarga di Lampung Utara dalam perspektif islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh TKI dan Remitansi Terhadap Kesejahteraan keluarga TKI ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang kesejahteraan keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan bisa digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang pengaruh jumlah TKI dan remitansi terhadap kesejahteraan keluarga.
- b. Bagi Pihak Yang Terkait Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya memperbaiki.
- c. Bagi Pihak Lain Sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang membutuhkan pada masa yang akan datang untuk lebih menciptakan kesejahteraan keluarga yang lebih baik di kabupaten Lampung utara.

## G. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai Pengaruh Pendapatan TKI Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini :

1. Heryanti (2017), skripsi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Kasunyatan Kecamatan Kasemen Serang - Banten)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan istri berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Pendapatan istri mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga sebesar 54.9% dan sisanya 45.1% ditentukan oleh variabel lain, antara lain: lingkungan tempat

tinggal yang nyaman dan kemampuan kerja yang sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dan tidak lupa dengan kodrat sebagai seorang istri dan ibu sesuai dengan syari'at Islam.<sup>16</sup>

2. Ni Luh Ayu Utaminingsih (2021), skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karangasem” Metode dalam mengumpulkan data yaitu berupa kuesioner dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu uji t guna mengetahui pengaruh secara parsial dan dilakukan uji F guna mengetahui pengaruh secara simultan. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan: (1) ada pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga. (2) ada pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. (3) ada pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup>
3. Dadang Rukmana (2021), skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga TKI”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: (1) variabel besaran remitansi secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga TKI, (2) variabel tingkat pendidikan keluarga secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga TKI, (3) lama kerja di luar negeri secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga TKI. Secara simultan, terdapat pengaruh signifikan antar variabel.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Heryanti, *Pengaruh Pendapatan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Kasunyatan Kecamatan Kasemen Serang - Banten)*. Skripsi (Banten: 2017), hlm.59.

<sup>17</sup> Ni Luh Ayu Utaminingsih. *Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karangasem*. Skripsi (Singaraja : 2021), hlm. 50.

<sup>18</sup> Dadang Rukmana, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga TKI*. Skripsi (Ponorogo : 2021), hlm. 3.

4. M. Alhudhori, Muhammad Amali (2020), Jurnal Universitas Batanghari Jambi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari uji parsialnya yang menunjukkan kontribusi pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga sebesar 7.89% dan dengan deskriptif variabel menunjukkan rata-rata pendapatan keluarga petani penggarap Sawit sebesar 60.77% dan masuk dalam kategori rendah. Hal ini berarti semakin rendah pendapatan yang dimiliki keluarga maka berdampak pada semakin rendah pula kesejahteraan keluarga. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang dimiliki akan berdampak dalam pemenuhan kebutuhan setiap keluarga sehingga ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan mengurangi tingkat kesejahteraan keluarga.<sup>19</sup>
5. Agung Purwanto, Budi Muhammad Taftazani (2018), jurnal Universitas Padjajaran yang berjudul “Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L” Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian dan analisis menunjukkan bahwa keluarga K3L memiliki tingkat kesejahteraan menengah ke bawah karena mereka masih mengeluh akan upah dan pendapatn mereka dari bekerja sebagai K3L Universitas Padjadjaran. Jumlah tanggungan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga apabila memang tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup, sehingga jumlah tanggungan akan terus berbanding lurus dengan jumlah pendapatan sebagai patokan tingkat kesejahteraan keluarga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Alhudhori, Muhammad Amali. *Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Manajemen dan Sains, 5(1), April 2020, 153-158 hlm. 156.

<sup>20</sup> Agung Purwanto, Budi Muhammad Taftazani. *Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L*. Jurnal Pekerjaan Sosia ISSN: 2620-3367 Vol. 1 No: 2, 2018, hlm. 33.

Seperti yang dipaparkan dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas atau meneliti mengenai pendapatan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan, di mana pada penelitian ini menggunakan variabel bebas, yaitu Pendapatan ( $X_1$ ), Kesejahteraan keluarga (Y) sebagai variabel terikat, dan objek dari penelitian ini yaitu keluarga TKI.

Perbedaan selanjutnya, pada penelitian ini tidak hanya menggunakan konsep konvensional saja, melainkan akan dijelaskan pula mengenai konsep ekonomi Islam dengan cara menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang mana pada ketigapenelitian di atas hanya membahas konsep secara konvensional. Kemudian, penelitian ini juga dimaksudkan untuk meneliti kembali variabel-variabel yang mengalami pro-kontra pada penelitian terdahulu sekaligus mengukur sejauh mana variabel-variabel bebas tersebut saling mempengaruhi.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I penulis menguraikan Penegasan Judul, latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### **b. BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab II penulis menjelaskan teori-teori yang mendasari dalam penulisan skripsi ini dan dipakai sebagai pedoman bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

### **c. BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada Bab III berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam perancangan untuk penyusunan skripsi ini.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini.

f. DAFTAR PUSTAKA

g. LAMPIRAN



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berarti rasa aman, hidup makmur, selamat dari gangguan/kesulitan, dsb.<sup>21</sup>

Teori kesejahteraan menurut Albert dan Hahne secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*<sup>22</sup>:

- a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraaannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Kesejahteraan mempunyai makna berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari berbagai aspek. Dalam hal

---

<sup>21</sup> Syamsul Arifin, dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 37

<sup>22</sup> Yulhendri, Nora Susanti. *Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Econosains Vol. 15 No. 2 Agustus 2017. Hal 187.

ini, kesejahteraan berarti suatu keadaan dimana masyarakatnya dapat memenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai masalah, atau dengan kata lain kesejahteraan merupakan keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup serta kemakmuran.

Tolok ukur kesejahteraan salah satunya adalah dilihat dari tingkat pendapatan seseorang, tidak bisa dipungkiri memang bahwa tingkat pendapatan merupakan peran utama dalam hal kesejahteraan, karena dengan pendapatan yang tinggi orang bisa mencukupi kebutuhannya atau memenuhi keinginannya. Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan tercukupi, kesejahteraan mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, salah satunya yaitu kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan.<sup>23</sup>

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>24</sup>

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian.<sup>25</sup>

Muana Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 37-38

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 162.

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Penerjemah : Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, S.E, Cet. 1. 1999, h. 361.

keluarga dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau Negara dari keseluruhan aktifitas yang dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah atau gaji yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya.

## 2. Jenis-jenis Pendapatan

Iskandar menjelaskan bahwa pendapatan dibagi menjadi dua yaitu: pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang telah mengalami pengurangan dari hasil produksi. pendapatan juga bisa diartikan sebagai pendapatan bersih seseorang baik berupa uang atau natura. Secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 diantaranya:<sup>27</sup>

1. Gaji dan upah. Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.
2. Pendapatan dari kekayaan. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari sumber lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran menyewa aset, bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain

---

<sup>26</sup> Muana Naga, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 200.

<sup>27</sup> Iskandar, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa*, Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 1 No. 2 (Oktober 2017): 129.

Menurut KBBI Pendapatan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usahanya yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Pendapatan

Jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Sumber pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga besar kecilnya pendapatan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi.

Iskandar membagi beberapa sumber penerimaan rumah tangga yaitu: Pendapatan Gaji dan Upah Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, yaitu:

- a) Keahlian (skill), adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- b) Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil pendidikan dan latihan.
- c) Kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 165

- d) Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atau balas jasa penggunaannya.
- e) Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima dari bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Misal tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan pendapatan rendah.<sup>29</sup>

#### 4. Indikator Pendapatan

Pendapatan merupakan hal yang paling penting bagi kesejahteraan menurut Mosher sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga bergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi besarnya pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.<sup>30</sup>

Pendapatan sendiri merupakan suatu unsur penting bagi perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang tergantung dari jenis pekerjaannya. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> skandar, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa*, hlm 128–29.

<sup>30</sup> Dian Komala Sari, dkk, *Analisis Pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani jagung di kecamatan Natar Kabupaten lampung Selatan*, jurnal penelitian, Vol 2, No. 1, Januari 2014, hlm 64.

<sup>31</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hlm. 102.

Menurut Bramastuti, indikator pendapatan antara lain penghasilan yang diterima perbulan, pekerjaan, beban keluarga yang ditanggung.<sup>32</sup>

## C. Kesejahteraan Keluarga

### 1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.<sup>33</sup>

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhankebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masihmemiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Raudhatul Husna Sitorus, Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Kabupaten Asahan Menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Skripsi 2020, hlm. 38.

<sup>33</sup>Wikipedia Ensiklopedia *Bebas, Kesejahteraan*, tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> (24 April 2022)

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet. ke-37 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.)

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi kebutuhan fisik, materil, mental, spiritual dan sosial, yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>35</sup>

## **2. Karakteristik Kesejahteraan Keluarga**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat suatu kriteria kesejahteraan sosial keluarga yang didasarkan atas:

- a. Kebutuhan dasar yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Kebutuhan sosial psikologis yang terdiri dari pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi internal maupun eksternal.
- c. Kebutuhan pengembangan yang terdiri dari tabungan, pendidikan, khusus, dan akses terhadap informasi.

---

<sup>35</sup> Departemen Sosial RI, *Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: CSIS 1995)

Sedangkan klasifikasi kesejahteraan keluarga menurut BKKBN yaitu:

- a. Keluarga pra sejahtera sering dikelompokkan sebagai “sangat miskin” adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator.
- b. Keluarga sejahtera I sering dikelompokkan sebagai “miskin” adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator.
- c. Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator.
- d. Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator.
- e. Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator<sup>36</sup>.

Ferguson, Horwood dan Beutrais menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibedakan kedalam kesejahteraan ekonomi (*family economic well-being*) dan kesejahteraan material (*family material well-being*).<sup>37</sup> Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran), sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Maslow menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri.

Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>36</sup> Herien Puspitawati, Skripsi Sarjana, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2012)

<sup>37</sup> Ibid

tersebut, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.<sup>38</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor intern keluarga dan faktor ekstern keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

- 1) Faktor Intern Keluarga Kemajuan zaman saat ini menyebabkan semakin tingginya segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan primer saja, akan tetapi juga kebutuhan lainnya, seperti hiburan, sarana ibadah, sarana transportasi, dan lingkungan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut.
- 2) Tempat tinggal Keadaan tempat tinggal akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Kondisi tempat tinggal yang bersih, sehat, nyaman dan teratur sesuai dengan keinginan penghuninya akan menimbulkan suasana yang aman, tentram, dan damai dalam keluarga.<sup>39</sup>
- 3) Keadaan sosial keluarga Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga bisa dikatakan baik atau harmonis, jika adanya suatu hubungan yang baik dengan didasari ketulusan dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga Manifestasi dari hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, terlihat dengan adanya saling hormat-menghormati, toleransi, saling

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> BKKBN *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan UU No.10 Tahun 1992 dan GBHN tahun 1993*. (Jakarta : Kantor Menteri Kependudukan, 1994), h.21-22.

membantu dan saling mempercayai.

- 4) Kondisi ekonomi keluarga Kondisi ekonomi keluarga adalah suatu faktor yang penting dalam kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga (BKKBN: 1995). Disisi lain, faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan.
- 5) Faktor Ekstern Keluarga Suatu keluarga diharuskan untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan keluarga, dengan hal ini diperlukan agar keguncangan dan ketegangan jiwa antara anggota keluarga dapat dihindari, karena dapat mengganggu ketentraman, keamanan, kenyamanan dalam keluarga.<sup>40</sup>
- 6) Keadaan sosial keluarga Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga bisa dikatakan baik atau harmonis, jika adanya suatu hubungan yang baik dengan didasari ketulusan dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga Manifestasi dari hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, terlihat dengan adanya saling hormat-menghormati, toleransi, saling membantu dan saling mempercayai
- 7) Kondisi ekonomi keluarga Kondisi ekonomi keluarga adalah suatu faktor yang penting dalam kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Disisi lain, faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan.

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 22

- 8) Faktor Ekstern Keluarga Suatu keluarga diharuskan untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan keluarga, dengan hal ini diperlukan agar keguncangan.

Faktor yang menyebabkan keguncangan dan ketegangan jiwa dalam keluarga yang datang dari luar yaitu:

- a. Faktor manusia diluar intern keluarga, seperti iri hati, fitnah dari tetangga, ancaman fisik dan pelanggaran norma.
- b. Faktor alam, seperti musibah tanah longsor, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, kerusakan lingkungan hidup. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan dimiliki oleh keluarga.<sup>41</sup>

Kedua faktor yang dijelaskan diatas saling berpengaruh satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan serta mempunyai sumbangan yang besar bagi terciptanya kesejahteraan keluarga.

#### **4. Indikator Kesejahteraan Keluarga**

Menurut BKKBN kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui indikator dibawah ini

- a. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan agama, pangan, sandang dan kesehatan. Bila ada salah satu dalam item kelompok I tidak terpenuhi. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Bila sebuah keluarga memenuhi semua kriteria seperti tertuang dalam item-item kelompok I tetapi salah satu kriteria dari tahap II belum terpenuhi.
- b. Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial

---

<sup>41</sup> Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, tersediadi:<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4193/140902062.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (25 November 2018)

psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi. Jika keluarga tersebut memenuhi semua kriteria tahap I dan II. Tetapi salah satu dari kriteria tahap III belum terpenuhi.

- c. Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan namun belum dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri. Bila keluarga tersebut telah memenuhi kriteria tahap I, II, III.
- d. Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri. Bila keluarga telah mampu memenuhi kriteria tahap I, II, III dan III+. Jadi, meskipun sebuah keluarga memenuhi kriteria tahap II, III, dan III+, salah satu item dalam tahap I tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masuk kategori prasejahtera.<sup>42</sup>

## **D. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.<sup>43</sup>

Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran menurut Philipus adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan pengupah di negara

---

<sup>42</sup> BKKBN: 2015

<sup>43</sup> Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), ha.1 03

dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.<sup>45</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja indonesia yaitu warga Indonesia yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

## **2. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap Calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan Calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia (dua puluh satu) tahun, adanya kebijakan umur menjadi standar Calon TKI, dalam prakteknya pemerintah melalui pelaksana penempatan

---

<sup>44</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatara, 2011)

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004*

TKI swasta (PPTKIS) standar umur tersebut tergantung kepada permintaan Mitra Usaha atau pengguna jasa dalam melakukan perekrutan calon TKI, jika dalam job order kebijakan negara penerima membolehkan calon TKI berusia kurang dari 18 tahun atau calon TKI berumur lebih dari 21 tahun maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

- 2) Sehat jasmani dan rohani, kesehatan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, secara umum dalam medical check up dilakukan mulai dari pemeriksaan darah lengkap, tes urine, serta rontgen.
- 3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dalam aspek kesehatan perempuan yang sedang hamil tidak dapat melamar sebagai calon tenaga kerja wanita karena hal tersebut dapat beresiko terhadap kesehatannya dan calon bayi.
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.<sup>46</sup>

Selain persyaratan tersebut, menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon TKI juga wajib memiliki dokumen– dokumen, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, Identitas-identitas tersebut harus asli dan setiap calon TKI wajib memenuhi.
- 2) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah,

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia *Pasal 35 huruf d Nomor 39 Tahun 2004* tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>47</sup> Pasal 51 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004*

- 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali,
- 4) Sertifikat kompetensi kerja, sertifikat kompetensi kerja di dapat saat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dalam waktu 60 hari, sertifikat kompetensi kerja diberikan sebagai tanda calon TKI sudah menyelesaikan pelatihan kerja. Jika selama pelatihan calon TKI gagal atau mengalami kesulitan dalam praktek kerja, maka akan di berikan tambahan waktu atau mengulang kembali sampai menguasai pekerjaannya.
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, medical check up dapat dilakukan calon TKI melalui PPTKIS tempat TKI mendaftar yang telah melakukan kerja sama kesehatan, hal tersebut dapat meminimalisir pengeluaran biaya calon TKI.
- 6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, pengurusan paspor sebagai dokumen resmi dapat dilakukan calon TKI melalui kantor Imigrasi setempat, jika kantor Imigrasi tidak memungkinkan karena jarak terlalu jauh dengan rumah maka pengurusan paspor bisa melalui kantor PPTKIS tempat calon TKI mendaftar atau di LTSA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
- 7) Visa kerja, kepemilikan visa juga sangat penting karena dengan visa kerja seseorang boleh bekerja dan menjadi karyawan suatu perusahaan di negara tujuan, paspor dan visa akan diberi cap (stempel) yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan. 8) perjanjian penempatan kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan kerja.
- 8) perjanjian kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis anatar TKI dengan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan kerja. Untuk jangka waktu perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis serta dapat diperpanjang, perpanjangan

jangka waktu tersebut dilakukan di hadapan pejabat berwenang di kantor perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

- 9) Kartu Peserta Asuransi (KPA). keikutsertaan asuransi calon TKI menjadi hal yang wajib sebagai bentuk perlindungan ketika calon TKI mendapat musibah ketika bekerja, oleh karena itu PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI sebagai peserta asuransi. Asuransi untuk calon TKI berlaku pada pra penempatan, selama penempatan, sampai purna penempatan.
- 10) keikutsertaan asuransi calon TKI menjadi hal yang wajib sebagai bentuk perlindungan ketika calon TKI mendapat musibah ketika bekerja, oleh karena itu PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI

### **3. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Pelaksanaan penempatan TKI swasta yang akan menempatkan TKI keluar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna jasa yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Pelaksana penempatan TKI juga harus membuat perjanjian tertulis dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, antara TKI dan pengguna jasa juga harus membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>48</sup>

Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia, atau negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja

---

<sup>48</sup> Ibid.

asing.<sup>49</sup> Ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Negara-negara tujuan penempatan TKI meliputi; Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Korea Selatan, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya.

Setelah Calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar negeri. Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 2004, pada masa pra penempatan kegiatan Calon TKI meliputi:

1) Pengurusan surat izin pengerahan (SIP)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki: a) Perjanjian kerjasama penempatan, b) Surat permintaan TKI dari pengguna, c) Rancangan perjanjian penempatan, d) Rancangan perjanjian kerja, Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan TKI dari pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan Calon TKI.

2) Perekrutan dan seleksi

Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada Calon TKI sekurang-kurangnya tentang: a) Tata cara perekrutan, b) Dokumen yang diperlukan, c)

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia *Pasal 2 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri* Oleh Pemerintah

Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI, d) Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan e) Tata cara perlindungan bagi TKI. Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

3) Pendidikan dan pelatihan kerja

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Apabila Calon TKI belum memiliki kompetensi kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian Calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

5) Pengurusan dokumen

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon TKI harus memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

6) Uji kompetensi

Bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang menjalani pelatihan wajib menjalani proses berikutnya yaitu uji kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah TKI sudah dapat dianggap memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk

menjalankan pekerjaan yang akan dipegangnya di luar negeri.

#### 7) Pembekalan Akhir

Pemberangkatan (PAP) PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat, perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap (1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan (2) materi perjanjian kerja. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menjadi tanggungjawab Pemerintah.

#### 8) Pemberangkatan.

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Calon TKI tersebut, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun Calon TKI dalam memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada Calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui instansi yang terkait, dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai termasuk perlindungan Calon TKI yang bekerja di luar negeri.<sup>50</sup>

#### 4. Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Hak hak seorang pekerja

- a. Upah yang telah disepakati;
- b. Fasilitas yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- c. Memperlakukan secara manusiawi dengan cara pemberian tanda penghargaan atau yanglainnya;
- d. Memberikan keadilan dalam aspek apapun;
- e. Memberikan jaminan yang layak dari penyedia pekerjaan;
- f. Jaminan keselamatan diri dan kebutuhan lainnya serta jaminan perlindungan selama bekerja berlangsung;
- g. Memberikan kepastian dalam perjanjian kerja.<sup>51</sup>

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan yakni “Setiap calon tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan”. Akan tetapi bentuk perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan maksimal apabila Tenaga Kerja Indonesia telah menjalankan prosedur secara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 31 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004*

<sup>51</sup> A.Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuahan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia

<sup>52</sup> Ach.Syafullah, 2002, “*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Skripsi Sarjana Strata 1 tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

## E. Perspektif Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Semantik Islam adalah ilmu multidimensi / interdisipliner, komprehensif dan terintegrasi, yang menggabungkan ilmu Islam dari Quran dan al-Hadits, dan ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan pengetahuan ini. Bisa mengendalikan Masalah dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu kebahagiaan. Islam menganggap harta adalah sebuah suatu anugrah dari Allah SWT. Manusia berhak mencari harta hingga menggunakannya untuk berbagai macam kebaikan. Islam membolehkan pencarian harta dengan berbagai macam cara, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, karena sebab dan alasan yang bertentangan dengan ajaran kebaikan dalam islam.<sup>53</sup>

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang ilhami oleh nilai-nilai islam. Menurut Umar Chapra, ekonomi islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari anjuran juga aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber material sehingga tercipta kepuasa manusia dan memungkinkan mereka menjalankan Allah dan masyarakat.<sup>54</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi islam menurut beberapa para ahli ekonomi islam sebagai berikut :

- a. Muhammad Abdul Manam memberikan pengertian ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- b. M. Umer Chapra mendefenisikan bahwa ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan

---

<sup>53</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

<sup>54</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insane Perss, 2001)

tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

- c. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. System ini bertolak dari Allah SWT, bertujuan kahir kepada Allah SWT, dan menggunakan saran yang tidak lepas dari syar'at Allah.

Masih ada banyak lagi para ahli yang mendefenisikan pengertian dari ekonomi islam, dari 3 para ahli di atas maka dapat didefenisikan sebagai segala praturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu dan berfungsi untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan hidup manusia, yang menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.

## 2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan sistem ekonomi islam terdapat dalam ajaran syari'at Islam yang di kembangkan dan kemudian di jabarkan oleh para ulama dan para pemikir-pemikir muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi islam:

- 1) Tauhid, ialah mewujudkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apapun yang dilakukan harus ada tanggung jawab. Umer Chapra menyebutkan bahwa batu fondasi keimanan yaitu Tauhid, dimana konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strategisnya. Tauhid mengandung pengertian bahwa alam semesta di gambarkan dan diciptakan secara sengaja oleh Allah yang maha kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena suatu kebetulan accident.<sup>55</sup>
- 2) Khalifah, ialah sebuah kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap : berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syariat islam, berekonomi semata-mata untuk

---

<sup>55</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*.

kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia dimuka bumi ini.<sup>56</sup>

Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz annafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Mengelaborasi konsep tersebut berbagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis Unsur *Maqashid Syariah* sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antarsesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjejewantahkan keberagamaan seseorang.
- 2) *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi haq alhayat (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untukmencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.
- 3) *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu haq al-ta'lim (hak mendapatkan pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan

---

<sup>56</sup> Ruslan Abdul Ghofur Nor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Formal Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>57</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari"ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017). Hlm. 8-9.

hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

- 4) *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
- 5) *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) menjadi haq alintirom al-insani (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

Tujuan Ekonomi Islam atau sering juga disebut sebagai Ekonomi Syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia, manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bahkan ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam karena sifatnya yang tidak terbatas. Menurut Nik Mustafa dalam Eko Suprayitno Islam berorientasi pada tujuan. Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. Secara umum tujuan-tujuan itu adalah:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensiional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan, setiap orang diharuskan menyediakan ataupun menopang setidaknya kebutuhannya sendiri dan keluarganya yang bergantung padanya. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji, oleh Karena itu semua makhluk hidup di ciptakan untuk manusia, dan hanya untuk manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim. Di tingkat kolektif, pendekatan ini mendorong semua orang untuk bekerja aktif dalam kehidupan ekonomi dan mencegah mereka dari berbuat semaunya. Islam yakin bahwa kerja sama ekonomi adalah kunci sukses. Efisiensi dan kemajuan ekonomi dapat dicapai dalam suatu lingkungan yang membuat setiap orang bekerja secara serasi. Dengan demikian, sistem ini menuntut agar semua usaha ekonomi diselenggarakan dan dikembangkan dengan semangat ini.
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam menomor satukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan yang ditawarkan Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi. masyarakat dan penguasa akan bertindak memberikan pertolongan jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang, sebaliknya, Ia sangat menekankan pentingnya kemandirian setiap orang melalui partisipasi dalam peluang-peluang ekonomi.

- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah keadilan ekonomi. Tercapainya tujuan-tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT
- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa

---

<sup>59</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2003.

yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..." (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- 6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat
- 7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari

pendapatan bersih investasi

- 8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

### 3. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*<sup>60</sup>

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu<sup>61</sup>:

Dan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, Sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya surah Al-Baqarah ayat 188 tersebut memberi pesan akan keharaman memakan harta seorang Muslim dengan jalan yang tidak benar, baik dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang ataupun pemalsuan. Masuk dalam kategori merampas, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, adalah korupsi.

#### b. Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971)

<sup>61</sup> Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia  
Referensi : <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

“*Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi Islam menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a) Kesatuan (*unity*)
- b) Keseimbangan (*equilibrium*)
- c) Kebebasan (*free will*)
- d) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.

#### **4. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara

efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Jika ketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan masalah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (falah).

## 5. Indikator dalam Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi indikator ekonomi Islam:<sup>62</sup>

1. **Pemilikan.** Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT. Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.

---

<sup>62</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

2. Modal. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "cost of money" ia memperhitungkan bunga. Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat.

3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik.

Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaannya. "Small Business Service" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.

4. Thaharah atau suci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam Islam.
5. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai

yang halal.

6. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.
7. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.
8. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
9. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridho illahi.
10. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
11. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk

membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.

## **F. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan. Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.<sup>63</sup>

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), jiwa

---

<sup>63</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

(hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl). Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.<sup>64</sup>

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial.<sup>65</sup> Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami (Edisi 3)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

## G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang secara teoritis memiliki kebenaran paling tinggi dan memerlukan adanya upaya pembuktian. Hipotesis juga dapat juga dikatakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.<sup>66</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, serta kerangka berfikir tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut ini :

Menurut penelitian Heryanti, skripsi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Kasunyatan Kecamatan Kasemen Serang - Banten)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan istri berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>67</sup>

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1.  $H_0$  : Pendapatan TKI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lampung Utara.
2.  $H_1$  : Pendapatan TKI berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>66</sup> E Sudarmanto et al., *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 204.

<sup>67</sup> Heryanti, *Pengaruh Pendapatan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Kasunyatan Kecamatan Kasemen Serang - Banten)*. Skripsi (Banten: 2017), hlm.59.

## DAFTAR RUJUKAN

Ach.Syafullah,2002, “*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Skripsi Sarjana Strata 1 tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Boediono, Seri. *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Danang Sunyoto, *Analisis Validasi & Asumsi Klasik* (Yogyakarta: Gava Media , 2012).

Dedi Aktur Rakhman, “*Dampak Remitensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri Bagi Peningkatan SDM di Daerah Asal:Studi kasus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo KabupatenBojonegoro*”. Skripsi di Universitas Negeri Malang, 2009.

Denik Dwi Susanti, Siti Komariah,Fifien Muslihatiningsi, *Pengaruh Migrasi dan TKI Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2003-2011*, (Jember: FE Universitas Jember, 2015). Vol.2, h.13-22.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus*.  
(Yogyakarta: New Elmatara, 2011).

Eny Haryati, “*Remitansi Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Ekuitas* Vol  
13 No. 3, 2009.

Fitria Permata Citra, dkk, “*Alokasi Penggunaan Remitansi Tenaga  
Kerja Wanita (TKW) Dan Dampaknya Terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat Desa Jorok Kecamatan Utan*”,(  
*Jurnal Tambora* Vol. 3 No. 3 Oktober 2019).

Gunawan, suodiningrat. *Membangun perekonomian rakyat*.  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Hair, *Multivariate Data Analysis*, (Prentice Hall: Pearson Education  
Internasional, 2006).

Haylul Maharani Putri, *Analisis Pengaruh Penerimaan Remitansi  
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bogor: FEM  
Institut Pertanian Bogor, 2016).

<https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/06/25/lnbxsh-ke-taiwan-tki-asal-lampung-menuju>. Diunduh pada tanggal 2  
Desember 2021

I Ketut Ardana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarannya  
Pengiriman Remitansi Ke Daerah Asal Studi kasus TKI  
Magang Asal Kabupaten Jemberana Di Jepang*, (Jemberana:  
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jemberana,  
2011)

Iqbal Ahmed Chowdhury, “*Impacts of Remittance on the Socioeconomic Condition of Bangladesh: An Analyssis*”, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences Vol.7 No.3 2014

Jawid, S. T., & Reza, S.A (2012). *Worker’s remittances and economic growth in China and Korea:an empirical analysis*. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(3), hal 185-193

Makhfudin, “*Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon*”. Skripsi pada UPI Bandung, Bandung 2011.

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2012).

Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004*

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Ratha, D. *The Impact of Remittance on Economic Growth and Proverty Reduction Migration Policy Institue*, 2003.

Ridwan, *Metode dan Teknik Mmenyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2000)

Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998)

Solimano, A. *Remittances by Emigrants*. 2003.

Sugiono, *Statistika untuk penelitian, cetakan kesembilan*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia N0.13 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

V Wiranata Sujarweni, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)